



TEOLOGI INTEGRALISTIK

Praktis Berteologi
Dalam Masyarakat Majemuk

Editor
Nataniel Elake,
Agusthina Ch. Kakiay
Yance Z. Rumahuru

Kata Pengantar
Pdt. Prof. Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D

DAFTAR ISI

Pengantar Editor	5
Pengantar Ketua STAKPN Ambon.....	9
Pengantar Emanuel Gerrit Singgih.....	11
BAGIAN SATU: PARADIGMA TEOLOGI INTEGRALISTIK.....	21
Bab 1 Membedah Teologi Integralistik (TI) Dalam Sebuah Diskursus Epistemologi, Aholiab Watloly.....	23
Bab 2 Menuju Teologia Integralistik, Hein L. Sapulette.....	51
Bab 3 Teologi Integralistik: Pendekatan Sejarah, M.Saleh. Putuhena.....	61

Bab 4	
Merambah Jalan Baru Menuju Teologi	
Yang Transformatif di Maluku, John Chr. Ruhulesin.....	85
Bab 5	
Teologi "Integralistik"	
Meretas Jalan, Merekonstruksi Identitas.....	107
BAGIAN DUA:	
PRAKSIS TEOLOGI INTEGRALISTIK.....	119
Bab 6	
Pembangunan Provinsi Kepulauan Sebagai Suatu Bentuk Kultur	
Masyarakat, Karel A. Ralahalu.....	121
Bab 7	
Teologi Intergralistik Selaku Teologi	
Untuk Dialog dan Rekonsiliasi:	
Belajar dari Tindakan <i>Bakudapa</i> dan <i>Bakubae</i> Orang Maluku,	
Yance Z. Rumahuru.....	137
Bab 8	
Yot, Yutut dan Sasi	
Menuju Teologi Integralistik	
Yang Pro Lingkungan, Rudolf Rahabeat.....	155
Bab 9	
Teologi Integralistik Dalam Konteks HAM	
Weldemina Yudit Tiwery.....	171
Bab 10	
Teologi Integralistik Dalam Perspektif Musik Gereja	
Branckly E. Picanussa.....	189

Epilog	
Farsijana Adeney-Risakotta.....	197
Biodata Penulis dan Editor.....	211

TEOLOGI INTEGRALISTIK SELAKU TEOLOGI UNTUK DIALOG DAN REKONSILIASI: *Belajar dari Tindakan Bakudapa dan Bakubae Orang Maluku*

Yance Z. Rumahuru

1. Dasar Pemikiran

Berbicara mengenai teologi sudah tentu setiap orang berpikir tentang iman. Memang benar bahwa teologi berkaitan dengan iman, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana iman itu dimengerti? Dalam ke-Kristen-an misalnya, apakah pada saat seseorang dibaptis dan mengaku percaya kepada Kristus, yang berarti pula beriman kepada Allah dalam Putra-Nya cukup pada suatu akta yakni pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah dan juru selamat dunia, dan berhenti di sini?. Bukan kah pengakuan seperti itu perlu di-konkretkan lagi melalui sebuah sikap yang terbuka untuk dinilai oleh semua orang? Dalam hemat saya, ini adalah persoalan yang hendaknya di respon oleh setiap orang percaya. Secara khusus bagi umat Kristen, perlu disadari bahwa ke-Kristen-an bermula dari sebuah pertemuan pribadi dengan "Pribadi" yang lain, yang diteruskan dengan akta pengakuan terbuka (Lihat Hardianto, 1998).

Hakekat ber-teologi dengan sendirinya adalah melakukan refleksi mengenai apa yang sudah dialami atau apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Hal ini berarti bahwa ber-teologi tidak lain adalah ber-refleksi tentang masalah-masalah yang konkret dan penting. Kalau begitu maka perlu disadari bersama, ber-teologi tidak harus dibatasi dengan pertanyaan seperti, bagaimanakah Alkitab atau kitab keagamaan tertentu berbicara mengenai alam, manusia dan sebagainya, tetapi dalam ber-teologi kita bertanya bagaimanakah seharusnya manusia membangun relasi dengan sesama manusia dan memelihara alam atau kelestarian fungsi lingkungan hidup secara baik dan benar. Bila hal itu terkait dengan relasi antar umat beragama maka pertanyaannya adalah bagaimanakah umat beragama memandang dirinya dalam relasi dengan sesama umat beragama dan secara bersama bertanggungjawab atas bumi yang satu, tempat semuanya berpijak.

Teologi integralistik (TI) yang di-wacana-kan oleh Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon awal abad XXI ini menurut saya, dapat dilihat dalam semangat evolusi pemikiran dan model-model teologi untuk menemukan bentuk teologi yang tepat atau relevan bagi masyarakat di Indonesia yang majemuk dan secara khusus di Negeri Maluku yang mengalami guncangan badai pertikaian¹ sosial yang mencabik-cabik nilai kemanusiaan di daerah ini. Tentu saja pemikiran teologi yang dikembangkan dari STAKPN Ambon ini bukan sesuatu yang baru, tetapi setidaknya pewacanaan ini dapat dilihat sebagai upaya memberikan penegasan terhadap

¹ Penggunaan terminology pertikaian menurut saya lebih baik dari konflik karena kata konflik telah terkonstruksi secara negatif pada masyarakat, terutama mereka yang mengalami peristiwa kekerasan secara langsung. Dalam hal ini, kata konflik menyiratkan pengalaman trauma yang dalam bagi mereka.

paradigma ber teologi dalam masyarakat yang majemuk, sekaligus membangun suatu kesadaran bersama tentang pentingnya konteks lokal untuk menyoroti berbagai persoalan bersama di masyarakat, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, gender dan sebagainya.

Dalam hemat saya, saatnya kita bersama memikirkan model teologi yang lebih terbuka, yang dibangun dari pengalaman pertemuan masing-masing komunitas, yakni dari suatu kondisi yang alami dan kultural. Hal itu dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari kelompok-kelompok sosial (=umat beragama). Salah satu yang akan dijadikan sebagai konteks untuk membicarakan topik tulisan ini adalah tindakan *bakudapa* dan *bakubae* yang terjadi selama pertikaian di Maluku.

2. Urgensi TI Bagi Dialog dan Rekonsiliasi

Satu dasawarsa yang lalu masyarakat Indonesia dihadapkan dengan krisis ekonomi. Tidak lama kemudian terjadi gerakan reformasi dan melengserkan Soeharto dari kekuasaannya selaku presiden Republik Indonesia. Pasca lengsernya Soeharto, terjadi berbagai pertikaian (konflik) sosial, baik yang berlatar belakang suku maupun agama. Pertikaian yang berlatar suku misalnya, terjadi di Kalimantan sedangkan pertikaian yang mengambil setting agama dijumpai misalnya di Maluku, dengan eskalasi konflik yang terpusat di Kota Ambon. Beberapa pertikaian antar suku maupun agama di Indonesia pasca lengsernya Soeharto sebagaimana disebutkan memberikan indikasi kuat bahwa wacana toleransi antar umat beragama yang dikawal rapi semasa kekuasaan Orde Baru ternyata tidak mengakar pada masyarakat karena tampaknya pendekatan yang digunakan pada masa itu lebih bersifat politik. Disebut demikian karena

fenomena toleransi pada masa Orde Baru lebih menguntungkan penguasa. Menurut pengamatan saya, toleransi atau-pun kehidupan harmonis yang dikonstruksi pada masa Orde Baru, tidak mengakar pada masyarakat dan menjadi semacam kesadaran kultural tetapi lebih dilakukan sebagai suatu keharusan karena ada tekanan dan kontrol dari alat-alat kekuasaan Negara (Rumahuru 2005:1-2).

Toleransi semu dan fakta tentang konflik pada berbagai wilayah di Indonesia setidaknya mendesak kita untuk memikirkan model teologi untuk dialog dan perdamaian. Persoalannya adalah, apakah suatu teologi untuk dialog dan perdamaian atau rekonsiliasi itu harus mendapat studi khusus dan semacam legitimasi dari orang-orang yang secara intens bergulat dengan disiplin teologi pada seminari-seminari, fakultas atau sekolah-sekolah teologi dan berbagai institusi formal agama yang dimiliki semisal Sinode, Keuskupan dan MUI? Apakah teologi harus mengacu pada teks-teks klasik yang karenanya, hanya menjadi bagian pembahasan dari sekelompok orang saja? Kalau memang demikian maka di manakah tempat bagi teks-teks sosial selaku sebuah realitas yang hidup dalam masyarakat, yang dapat dibaca oleh siapa saja, dari latar disiplin ilmu mana pun?.

Pertanyaan-pertanyaan di atas paling tidak telah menggelisahkan saya untuk turut mengambil bagian bersama teman-teman dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Ambon maupun teman-teman (bapak-ibu) yang lain dari berbagai institusi maupun perorangan, bersama-sama mewacanakan suatu pemikiran teologi terkait konteks sosial masyarakat di Indonesia, secara khusus di Maluku sekarang ini. Idealnya, pewacanaan ini pada waktunya dapat menemukan suatu model teologi yang mengacu dari fakta keberagaman, fenomena

konflik dan disintegrasi, harmoni dan budaya damai atau integrasi dan berbagai konsentrasi bersama membangun Maluku pasca pertikaian (Maluku kontemporer).

Artikel ini membahas cara orang Maluku menyelesaikan pertikaian melalui suatu pendekatan kultural, yakni tindakan *bakudapa* dan *bakubae* selama konflik, yang dalam hemat saya dapat dipahami selaku bagian dari 'tindakan teologis' mereka untuk menghentikan pertikaian dan membangun rekonsiliasi dengan cara mereka sendiri (banding pemikiran Forest dalam Baum dan Wales, 1997). Tulisan ini dengan sendirinya bertujuan membangun sebuah refleksi dari kebiasaan kelompok-kelompok sosial di Maluku untuk berkomunikasi atau saling menyapa dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam masyarakat yang majemuk.

Diketahui bersama, pertikaian di Maluku terjadi dalam kurun waktu yang relatif panjang (1999–2002), dan berdampak hingga kini. Pada masa tersebut, telah terjadi pembunuhan, pembantaian, penjarahan, pengrusakan dan pembakaran rumah penduduk, tempat ibadah serta berbagai fasilitas umum seperti sekolah, universitas, perkantoran, bangunan pasar dan rumah sakit. Kondisi ini sekaligus menciptakan segregasi pada masyarakat, baik secara fisik maupun non fisik. Dalam kondisi keamanan yang tidak menentu dan kondisi sosial dimana masing-masing komunitas umat beragama saling mencurigai dan berupaya untuk saling menghancurkan, ditemukan bahwa terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang berupaya membangun komunikasi, dan berjumpa satu dengan yang lainnya, sekalipun mereka sadar bahwa apa yang dilakukannya dalam kondisi krisis saat itu sangatlah berisiko karena akan di anggap oleh kelompok internalnya selaku 'provokator', dan bisa berakibat mereka dan

keluarganya dieksekusi masa. Fenomena *bakudapa* yang disebutkan ini menarik untuk dikaji karena dalam pengamatan saya, hal itu telah membantu mencairkan kebekuan di antara masing-masing komunitas sosial di Maluku menuju rekonsiliasi dan perbaikan hidup masyarakat seperti tampak sekarang ini.

3. *Bakudapa* dan *Bakubae* Sebagai Model Berteologi Masyarakat

3.1. Konsep *Bakudapa* dan *Bakubae*

Sebelum membahas bagian ini lebih jauh, ada baiknya dirumuskan sebuah definisi atau batasan pemikiran mengenai apa yang dimaksud penulis dengan *bakudapa* dan *bakubae*. Saya berpendapat bahwa istilah lokal (melayu Maluku) *bakudapa*, dapat dipahami sebagai perjumpaan yakni relasi yang terbangun baik secara formal maupun non formal. Sedangkan *Bakubae* sendiri menunjuk kepada kondisi atau peristiwa dimana masing-masing pihak yang bertikai baik perorangan maupun kelompok, sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ataupun kejadian yang telah terjadi di antara mereka.

Dalam kehidupan hari-hari orang Maluku, dijumpai bahwa sewaktu-waktu ada *bakalae*² di antara individu maupun kelompok, tetapi selalu diikuti dengan *bakubae*. Dalam proses *bakubae* sering pihak-pihak yang *bakalae* atau bertikai menahan diri sambil menunggu waktu yang tepat. Misalnya, menjelang hari raya keagamaan (Natal atau Idul Fitri), atau saat ketegangan berangsur-angsur surut di antara mereka yang bertikai. Umumnya *bakubae*

² Saya melihat *bakalae* sebagai bentuk kata kerja yang menyatakan kalau seseorang sedang ber-konflik dengan orang lain. Hal ini bisa dalam bentuk perkelahian mulut maupun berhadap-hadapan secara fisik.

terjadi atas inisiatif satu pihak dan dimediasi oleh pihak ketiga. Yang biasa dijadikan sebagai mediator dalam hal *bakubae* adalah orang yang lebih tua atau yang disegani dari soa atau mata rumah. Kalau mereka ini tidak sanggup maka kemungkinan dibutuhkan intervensi pemerintah negeri atau pemimpin formal lainnya, terutama pemimpin agama. Apabila *bakubae* telah dilakukan maka terjadi pula penerimaan satu terhadap yang lain, didahului dengan saling memaafkan dan melupakan peristiwa yang pernah terjadi di antara mereka. Pieter Tanamal dengan melihat kasus perkawinan menyebutkan bahwa waktu yang baik untuk melakukan *bakubae* bagi pasangan kawin lari adalah setelah mereka memperoleh anak, disamping waktu seperti perayaan-perayaan keagamaan.

Konsep mengenai *Bakudapa* dan *Bakubae* seperti disebutkan menurut hemat saya, dapat digunakan untuk menggantikan kata dialog dan perdamaian atau rekonsiliasi, sekalipun disadari bahwa pada kasus tertentu penggunaan *term* masing-masing bisa saja memiliki pengertian atau perspektif yang berbeda. Terlepas dari perbedaan di antara masing-masing istilah (jika ada), dalam penulisan ini saya menggunakan kata *Bakudapa* untuk menyebutkan dialog atau perjumpaan dan *Bakubae* untuk menyebutkan perdamaian dan rekonsiliasi.

3.2. Model-model *Bakudapa* dan *Bakubae*

Pembahasan ini mengacu pada penelitian saya mengenai dialog dan inisiatif damai di Ambon, November 2004 – Februari 2005. Saya menemukan bahwa terdapat kelompok-kelompok di Ambon maupun Maluku secara keseluruhan yang melakukan proses *bakudapa* dan *bakubae* selama pertikaian terjadi 1999 – 2002. Terdapat empat unsur yang berperan. Pertama kelompok

kepentingan ekonomi, di dalamnya terdapat *papalele*, pedagang di pasar kaget atau pedagang kecil, sopir angkutan umum dan angkutan barang (*truck*) serta para nelayan. Kedua, kelompok kepentingan pendidikan, terdapat siswa, Mahasiswa, guru dan dosen. Ketiga, komunitas adat, terdapat di dalamnya para raja, para *saniri*, *latupati*, persekutuan *jujaro-mungare*, serta *soa* atau marga tertentu yang memiliki hubungan genealogis dengan komunitas yang berbeda agama. Terakhir adalah kelompok pekerja sosial dan independen, terdiri dari NGO, fasilitator perdamaian dan forum-forum yang dibentuk atas inisiatif komunitas setempat (lihat Rumahuru, 2005).

1. Kelompok kepentingan ekonomi

Yang dimaksudkan dengan kelompok kepentingan ekonomi di sini adalah kelompok-kelompok masyarakat biasa yang karena tuntutan kebutuhan hidup (terutama makan) mengorganisir diri secara diam-diam untuk berkomunikasi dengan pihak lain di luar komunitasnya.

1.1. *Papalele*³ dan Penjual di 'Pasar Kaget'⁴

Pada minggu-minggu pertama pertikaian di Ambon, aktivitas ekonomi terutama pasar lumpuh total. Dua buah pasar utama di

³ Papalele adalah istilah di Ambon untuk menyebutkan pedagang kecil yang berjualan keliling membawa barang dagangannya berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain. Namun demikian dibedakan dari pedagang asongan di tempat lain. Umumnya papalele adalah orang yang membawa dan menjual hasil panen kebunnya sendiri seperti buah-buahan, sayuran dan jenis umbi-umbian, atau hasil tangkapan ikannya. Belakangan ini barang dagangan mereka sudah cukup bervariasi dan bisa saja dibeli dari tempat lain kemudian dijual kembali.

⁴ Pasar kaget adalah suatu istilah yang baru muncul pada tahun 1999 atau setelah pertikaian di Ambon. Yang dimaksudkan adalah para penjual kontemporer yang selama konflik berinisiatif menjual kebutuhan pangan seadanya pada wilayah-wilayah pemukiman warga. Sejak tahun 2002 telah dilakukan lokalisasi oleh pemerintah kota Ambon pada lokasi pasar yang dibangun pemerintah, namun masih cenderung memotong pasar dengan berjualan pada pinggir jalan dan pemukiman warga.

kota Ambon yakni pasar Mardika dan pasar Gambus terbakar. Begitu pula jalur transportasi yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya di kota Ambon macet karena dipalang atau dibarikade (ditutup) oleh masing-masing kelompok masyarakat, sehingga tidak ada distribusi bahan pangan dari satu tempat ke tempat lain.

Di Passo sampai dengan tahun 2000 masih ada petani asal Sulawesi dan Jawa (beragama Islam) yang menanam sayur-sayuran disamping penduduk 'asli' Passo sendiri. Begitu pula sebaliknya di wilayah Batumerah terdapat tempat penampungan ikan milik beberapa pengusaha di samping hasil tangkapan nelayan tradisional yang banyak, tetapi tidak bisa didistribusikan ke wilayah lain. Komunikasi antar warga pun terputus. Masing-masing komunitas sosial (Islam dan Kristen) tetap berada pada wilayahnya sendiri, sementara konflik terus ber-eskalasi tinggi. Dalam kondisi seperti ini terdapat kelompok-kelompok masyarakat pada kedua komunitas yang secara sembunyi-sembunyi dan penuh risiko saling berkomunikasi dan mengadakan transaksi kebutuhan pangan untuk dijual kepada masyarakat di lingkungannya.

1.2. Sopir Angkutan Umum dan Angkutan Barang

Selama pertikaian terjadi, tidak ada transportasi yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya di Ambon, dan komunitas agama tertentu tidak bisa melewati wilayah komunitas agama lainnya. Dalam kondisi seperti ini, terdapat inisiatif dari beberapa sopir angkutan umum dan barang untuk melakukan transaksi pada wilayah-wilayah yang netral. Hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui publik, karena cukup berisiko bagi keselamatan mereka sendiri maupun penumpang dan

barang bawaan nya. Apa yang dilakukan mereka sering mendapat teror dari orang-orang tidak dikenal, tetapi mereka memiliki cara tersendiri sehingga proses ini tetap berjalan selama konflik.

1.3. Kelompok Nelayan

Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa nelayan lokal memiliki mekanisme sendiri untuk berjumpa satu dengan yang lainnya. Beberapa informan di Ambon menyebutkan, sering terjadi pertemuan antar sesama nelayan di beberapa tempat (perairan) saat pertikaian. Umumnya mereka saling menukar informasi dan hasil tangkapan untuk dijual ke masyarakat.

2. Kelompok kepentingan pendidikan

Ketika terjadi pertikaian, beberapa sekolah hancur, dan para siswa dari komunitas agama yang berbeda hampir tidak bisa belajar bersama. Umumnya dibuka sekolah-sekolah 'alternatif' pada masing-masing lingkungan. Walau begitu, dalam melakukan aktifitasnya selalu ada koordinasi antara para guru melalui dinas Pendidikan Nasional setempat untuk memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar maupun penyamaan persepsi terhadap kondisi yang dialami. Jadi kegiatan kelompok kepentingan pendidikan nampak terutama melalui penyelenggaraan pendidikan atau aktivitas belajar mengajar. Di kota Ambon misalnya, sampai dengan tahun 2001 masih ada sekolah-sekolah tertentu yang menyelenggarakan pendidikan (pengajaran) dengan keterlibatan siswa dari kedua komunitas agama.

Di tingkat universitas, inisiatif untuk dialog dan upaya perdamaian nampak dalam aktivitas di kampus. Di Universitas Pattimura (Unpatti) misalnya, terdapat kesepakatan seluruh civitas

akademika untuk menjadikan kampus wilayah netral. Hal ini diikuti oleh penciptaan mekanisme internal untuk memproteksi wilayah kampus dari berbagai kemungkinan penyusupan dan provokasi di kampus. Walau pada akhirnya satu-satunya universitas kebanggaan orang Maluku ini dijarah dan di-rusak-an, setelah perumahan warga di sekitarnya diserang dan dibakar pada tahun 2001. Contoh lain adalah Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM). Sekalipun terjadi pertikaian yang melibatkan agama dan UKIM juga menjadi sasaran perusuh⁵, namun Mahasiswa yang beragama Muslim pada beberapa Fakultas tetap dilindungi dan diberikan kesempatan hingga menamatkan studinya.

Inisiatif damai oleh kelompok kepentingan pendidikan juga muncul melalui kajian-kajian yang diberikan kepada pihak-pihak pengambil kebijakan di daerah maupun pemerintah pusat. Disamping itu, terdapat personal-personal maupun kelembagaan dari kelompok ini, dalam berbagai aktivitas rekonsiliasi oleh pemerintah maupun lembaga independen lainnya. Salah satu kegiatan yang patut disebutkan sebagai bagian dari upaya dialog dan inisiatif damai yang dilakukan oleh pihak Unpatti adalah bekerja sama dengan Gerakan *Bakubae* Maluku dan Yayasan Kemala

⁵ UKIM terletak tepat di kota Ambon, berdekatan dengan pemukiman komunitas Muslim maupun Kristen. Selama pertikaian selalu menjadi sasaran penyerangan dari kelompok perusuh. Motif dibalik penyerangan itu tidak jelas. Motivasi penyerangan terhadap UKIM terlepas dari pelabelan Kristen-nya yang dilihat sebagai satu simbol keagamaan tertentu, tetapi dugaan yang kuat adalah, sama seperti penghancuran tempat-tempat pendidikan lainnya secara misterius, sedang terjadi pembodohan secara sistematis terhadap orang Maluku. UKIM kemudian berhasil di bobol dan dibakar habis pada tanggal 23 Juni 2001. Yang tersisa adalah satu unit perpustakaan dan satu unit bangunan baru yang kemudian direnovasi dan digunakan kembali sejak tahun 2003. Pada tanggal 25 April 2004, kampus UKIM kembali diserang dan membumi hanguskan perpustakaan, laboratorium Bahasa, laboratorium Komputer dan laboratorium fakultas Teknik Sipil. Data yang disebutkan merupakan hasil penelitian lapangan November 2004 – Februari 2005 di Ambon.

melakukan Musyawarah Raja-raja dan *Latupati* yang berlangsung selama tiga hari (tanggal 9 – 11 Januari 2003) di kampus Universitas Pattimura. Pertemuan ini kemudian melahirkan beberapa kesepakatan dan rekomendasi di bidang pendidikan, ekonomi, penanganan pengungsi, sosial budaya serta hukum dan keamanan.⁶

3. Kelompok komunitas adat

Diketahui, agama di setting menjadi dominan selama pertikaian dan hampir menjadi kesepakatan umum bahwa pertikaian yang terjadi di Maluku adalah konflik agama. Hal mana berimplikasi pada relasi antar sesama umat beragama, di mana tingkat kecurigaan dan pemikiran negatif oleh masing-masing penganut agama begitu tinggi. Agama menjadi sensitif bagi komunitas-komunitas sosial di Ambon. Dalam kondisi seperti ini terdapat inisiatif dari tokoh-tokoh adat yang untuk waktu lama tidak berperan. Mereka membangun komunikasi melalui pendekatan kultural yang dimilikinya. Komunikasi sebagai mana dimaksud, umumnya diawali dengan kelompok atau negeri-negeri yang memiliki hubungan genealogi dan hubungan kultural tertentu, baik yang se-kandung (*gandong*), maupun yang ada keterikatan karena perjanjian leluhur (*pela*). Relasi terbatas ini kemudian diperluas ke wilayah lain untuk membuka jalur-jalur transportasi dan komunikasi sehingga memungkinkan terjadinya perjumpaan dan saling memasuki wilayah-wilayah lain, yang selama pertikaian dianggap rawan oleh masing-masing komunitas. Sebagai contoh, di kota Ambon negeri Batu Merah (Islam) dengan negeri Passo (Kristen) dalam relasi sebagai *pela*.

⁶ Lihat, Ichan Malik (et.al.) Mematahkan Kekerasan Dengan Semangat Bakubae, Jakarta: YAPPIKA dan Gerakan Bakubae Maluku, 2003, hal. 1-9.

Fakta mengenai relasi antara negeri-negeri yang memiliki hubungan kultural di Maluku khususnya di Ambon atau Maluku Tengah dapat dilihat dalam dua bentuk. Bentuk pertama, menghindari konflik dengan negeri yang berpela atau bergandong. Kedua, sebagian turut terlibat dalam penyerangan terhadap negeri-negeri yang berpela dan bergandong. Bentuk pertama merupakan bentuk yang umum dilakukan oleh kebanyakan negeri di Maluku Tengah. Bahkan mereka saling melindungi dan saling membantu selama pertikaian terjadi. Orang-orang Batumerah dan Passo termasuk dalam kelompok ini. Bentuk kedua memang jarang terjadi, tetapi saya menemukan tiga (3) kasus di Maluku Tengah untuk melihat fenomena ini. Pertama, Orang Pelauw (negeri Islam di pulau Haruku) menyerang orang Hulaliuw (negeri Kristen di pulau Haruku), padahal relasi Pelauw dan Hulaliuw adalah sebagai gandong. Kedua, Orang Rutha (negeri Islam di Seram Selatan) turut terlibat dalam penyerangan ke Amahai (negeri Kristen di Seram Selatan). Relasi mereka adalah sebagai gandong. Ketiga, sebagian orang Hitu (negeri Islam di pulau Ambon) turut terlibat dalam penyerangan ke Rumahtiga (negeri di p.Ambon, penduduknya bercampur namun yang asli adalah beragama Kristen). Relasi mereka adalah *pela*.

Dialog dan inisiatif damai oleh masyarakat di Ambon secara luas dapat dilihat melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat kurun waktu 1999 sampai 2003. Dalam hal ini melalui pembentukan forum bersama, kegiatan kebersamaan, maupun komunikasi dan perjumpaan satu dengan yang lainnya. Tidak semua peristiwa dicatat dalam penulisan ini hanya beberapa sebagai contoh. Pertama, di daerah Ahuru Kota Ambon, prakarsa damai dilakukan di antara para tokoh masyarakat

(dan agama) setempat, dengan melibatkan masyarakat sekitar, khususnya Karangpanjang dan Batumerah pada tanggal 21 Januari 1999. Interaksi dua komunitas diwujudkan dalam acara makan bersama, serta kesepakatan untuk tidak memperluas konflik⁷.

Kedua, di wilayah desa Wayame. Dalam hal ini dibentuk Tim 20 Wayame sejak bulan Pebruari 1999. Tim yang secara imbang keanggotaannya melibatkan dua komunitas ini, sejak awal pembentukannya bertekad menjaga dan mempertahankan desa Wayame dari imbasan konflik. Dalam implementasi kegiatannya, secara ekstrim tim ini menghindari intervensi eksternal dalam upaya mempertahankan keamanan di wilayah mereka. Sekalipun di kemudian hari beberapa kalangan menilai kedudukan kilang distribusi minyak pulau Ambon di wilayah desa Wayame merupakan indikasi tidak diserangnya Wayame, namun pada kenyataannya pertahanan bersama dua komunitas di Wayame tetap utuh terjaga sampai konflik fisik di Maluku dianggap berakhir⁸.

⁷ Hasil penelitian di Batumerah dan Passo, November 2004 – Februari 2005. Lihat juga Jecky Manuputty dan Daniel Watimanela, *Konflik Maluku dalam Lambang Trijono* (ed.al.) POTRET RETAK NUSANTARA, Studi Kasus Konflik di Indonesia, Yogyakarta: CSPS BOOKS, 2004, hal 138. Menurut penuturan warga setempat, sama seperti Manuputty dan Watimanela sebutkan, pertemuan antar komunitas atas prakarsa tokoh masyarakat maupun agama baik secara tertutup maupun terbuka, yang diakhiri dengan acara 'makan patita' bersama terjadi di berbagai wilayah kota Ambon maupun di seluruh Maluku. Hal mana dimaksudkan terutama sebagai upaya pencegahan perluasan konflik. Namun demikian berbagai upaya yang dilakukan tidak mampu menahan terjadinya pertikaian. Disayangkan bahwa upaya-upaya spontan masyarakat untuk meredam konflik dan membangun interaksi bersama, sangat bergantung kepada dinamika dan eskalasi konflik. Kontinuitasnya tak berlangsung linear. Meskipun demikian kelenturan model-model interaksi ini, tetap memungkinkan terjadinya penyesuaian dengan dinamika konflik yang berkembang. Satu hal yang lemah dari upaya-upaya rekonsiliasi resmi yang dilakukan berbagai pihak, bahwa segmen-segmen interaksi publik ini hampir tak pernah terjamah sebagai modal sosial yang telah tersedia dalam masyarakat.

⁸ Ibid.

4. Kontribusi TI bagi umat beragama

Secara makro, teologi integralistik dapat dipahami dalam pemikiran melemahnya batas-batas eksklusif dan menguatnya sikap pluralis di antara masing-masing pemeluk agama. Paul F. Knitter menggunakan istilah 'orang lain yang asing' dan 'tetangga dekat' untuk membicarakan fenomena ini. Dengan latar belakang selaku teolog Kristen, Knitter mengemukakan fakta bahwa pada masa yang lalu orang Kristen selalu menganggap agama lain di luar dirinya berbahaya dan selalu dicurigai. Bila terdapat hubungan orang Kristen dengan agama lain maka ini merupakan salah satu upaya untuk mengajak mereka berpindah agama. Tetapi sikap seperti ini telah berubah drastis setelah terjadi perjumpaan dengan semakin banyak komunitas dari berbagai latar belakang agama seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, Yahudi dan terutama dengan Islam. Orientasi awal yang menganggap bahwa agama yang lain di luar ke-Kristen-an adalah sesat dan karena itu perlu dibawa ke jalan yang benar atau terang agar mereka diselamatkan alias masuk surga diganti dengan berjumpa, berbicara dengan mereka dan sama-sama mengatasi persoalan kemanusiaan yang dihadapi bersama. Dalam pikiran Knitter, perjumpaan atau dialog harus menjadi prasyarat teologis untuk memahami keberagaman yang dimiliki (Knitter, 2003, 1996).

Saya berpendapat bahwa teologi integralistik dalam konteks Indonesia mengasumsikan kesatuan dari komponen-komponen yang beragam (plural). Dalam konteks ini keanekaan suku bangsa dan budaya (multi-etnik dan multikultural) menjadi kekayaan untuk saling mengisi. Sinergi masing-masing komponen yang berbeda tidak lain dimaksudkan dalam rangka menjamin kualitas masing-masing

kelompok dalam masyarakat, termasuk umat beragama guna membangun keberlanjutan hidup bersama dalam satu *oikos* ini. Kesatuan komponen-komponen yang berbeda dalam hal ini tidak sama dengan penyeragaman atau uniformitas sebagaimana ditekankan pada masa Orde Baru. Dalam pemikiran ini, teologi integralistik membuka ruang dimana masing-masing pihak dalam konteks nya secara bebas berjumpa dan saling menyapa dengan penuh penghargaan terhadap keanekaan yang dimiliki, tanpa memaksakan suatu situasi atau ajaran dan pemikiran tertentu selaku norma yang patut di ikuti yang lain.

Teologi Integralistik dalam konteks Indonesia tanpa tawar-menawar, menghargai individu atau suatu kolektiva dan atau habitus tertentu dalam ranah-nya dan bersedia mendengar satu dengan yang lain, saling menyapa dalam keramahan dan kesejajaran, yang pada akhirnya memunculkan pemahaman bersama dan saling mengakui serta saling percaya satu terhadap yang lain. Apa yang dikatakan ini sekaligus merupakan esensi dari teologi yang pro hidup dan pro kemanusiaan serta keutuhan semesta.

Dalam konteks Maluku, fenomena *bakudapa* dan *bakubae* sebagaimana dikemukakan di atas menjadi hal yang signifikan selaku tindakan ber-teologi masyarakat karena: pertama, *bakudapa* atau dialog mensyaratkan perjumpaan dengan yang lain, dimana melalui perjumpaan itu masing-masing pihak saling memahami, saling menerima dan membangun sikap saling percaya. Di sini terdapat penghargaan yang tulus terhadap aspek kepelbagaian atau kemajemukan. Kedua, *bakubae* atau perdamaian dan rekonsiliasi, biasanya dihubungkan dengan aspek keamanan, keadilan dan kebenaran, serta kelayakan hidup. Apa yang ditampilkan dalam

bakudapa dan *bakubae* dengan sendirinya merupakan esensi dari teologi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, apabila teologi dipahami sebagai refleksi tentang kehidupan sosial manusia yang konkret dalam relasinya dengan Allah, sesama manusia dan ciptaan lain, maka hal itu sekaligus menegaskan bahwa setiap teologi adalah kontekstual dan karenanya integral, total dalam memenuhi tuntutan masyarakat pada jamannya. Kedua, dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, diperlukan adanya bentuk teologi yang lebih terbuka, yang dapat diterima oleh semua warga (masyarakat) dari berbagai agama dan denominasi serta etnis dan ideologi. Ketiga, metode berteologi yang tepat untuk diterapkan dalam konteks saat ini adalah metode dialog.

Referensi

- Barkar Anwar M., ed. 1970 *Conflict, Violence, and Peace*. Geneva: World Council of Churches.
- Baum G. & Wells H., eds. 1997 *The Reconciliation of Peoples: Challenge to the Churches*, WCC Publication and ORBIS BOOKS.
- Broek Theo van den dan R. Kambayong. 2004 *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi*, Jayapura : LSPP dan SKP.
- Bryant M.D. & Ali S.A., eds. 1998 *Muslim-Christian Dialogue: Promise and Problems*, United States: Paragon House.

- Dupuis J, S.J. 2002 *Christianity And The Religions: From Confrontation to Dialogue*, New York: Orbis Books.
- Hardianto, Anjar S., 1998 Pengantar Ke Teologi Labaran: Objek-Persoalan Dasar-dasar Metode, Salatiga: UKSW.
- Kung, Hans. 1991 *Global Responsibility : In search of a New World Ethic*, New York: Crossroad.
- Kniter, Paul F. 2003 Satu Bumi banyak Agama, *Dialog Multi-Agama dan tanggung Jawab Globa*, Jaakarta : BPK Gunung Mulia.
- , 1996 *Jesus and The other Names: Cristian Mission and Global Responsibility*, Orbis Books, Maryknoll, New York 10545.
- Malik Ichan (et.al.) 2003 Mematahkan Kekerasan Dengan Semangat Bakubae, Jakarta: YAPPIKA dan Gerakan Bakubae Maluku.
- Rumahuru, Y.Z. 2005 *Peace and Dialog: Kajian Sosiologi Terhadap Dialog dan Inisiatif Damai di Ambon 1999 – 2002*, (tesis) Yogyakarta: UGM.
- Sherbok D.C. ed. 2001 *Interfaith Theology A Reader*, Oxford: One World. Sherwin B.L & Kasimow H. eds. 2000 *John Paul II and Interreligious Dialogue*, New York: Orbis Books.
- Swidler L and Mojzes P., 2000 *The Study of Religion in an Age of Global Dialogue*, Temple University Press, Philadelphia.
- Trijono Lambang (ed.al.) 2004 POTRET RETAK NUSANTARA, Studi Kasus Konflik di -